



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

3. Nama Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

4. Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan

Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5. Struktur Organisasi Tata Kerja Per 31 Desember 2019

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau secara lengkap menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.1

6. Daftar Urut Kepangkatan Per 31 Desember 2019

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia berjumlah 67 orang, sesuai daftar urut kepangkatan sebagai berikut dalam Tabel 1.2 :

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.

Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan DPPA tahun 2019

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.553.339.800,00
	1)	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00
	2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.500.000,00
	6)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	116.043.800,00
	7)	Penyediaan jasa administrasi keuangan	174.156.000,00
	8)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.500.000,00
	9)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00
	10)	Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000,00
	11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00
	12)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.000.000,00
	13)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00
	14)	Penyediaan Peralatan rumah tangga	5.600.000.00
	15)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00
	17)	Penyediaan makanan dan minuman	31.000.000,00
	18)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00
	19)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000,00
	20)	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	573.540.000,00

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		5.000.000,00
	22)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		182.634.000,00
	1)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00
	10)	Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	157.634.000.00
	12)	Sosialisasi Kinerja Program OPD	20.000.000,00
15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif		116.000.000,00
	3)	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	116.000.000,00
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		295.000.000,00
	4)	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	295.000.000,00
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		865.000.000,00
	1)	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	150.000.000,00
	7)	Fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	600.000.000.00
	8)	Fasilitasi Sertifikasi Halal	115.000.000.00
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		590.000.000.00
	6)	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	590.000.000.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		316.500.000.00
	5)	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	50.000.000.00
	9)	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	66.500.000.00
	12)	Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah	200.000.000.00
17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		87.984.000.00
	13)	Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan Luar Negeri	81.984.000.00
17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		290.000.000.00
	1)	Pembinaan kemampuan teknologi industri	290.000.000.00

18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		16.478.119.000.00
	3)	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	4.481.811.000.00
	9)	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000.00
	10)	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000.00
	11)	Operasional Pasar	7.254.000.000.00
	12)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.280.358..000.00
	14)	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000.00
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		450.000.000,00
	4)	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100.000.000.00
	5)	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	350.000.000.00
Jumlah			21.229.576.800,00

8. Program Prioritas dan Realisasi Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada tabel 2.2 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Prioritas Tahun 2019

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi
			2019	2021		2019
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (Jumlah Industri Kecil Menengah yang di kembangkan)	900	950	Diskoperindag	910
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	5	5,55	Diskoperindag	4,2

9. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan DPPA Tahun 2019

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.229.567.800,00 yang terbagi dalam 12 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 82,10% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. **17.429.444.889,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan berserta capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.553.339.800,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.486.286.056,00 dengan persentase 95,68%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 2.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	2.967.500	84,79	200 surat keluar	216 surat keluar	108
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.500.000	153.475.476	95,03	12 bulan	12 bulan	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	116.043.800	97.973.211	84,43	21 unit	14 unit	66.67
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	174.156.000	166.776.000	95,76	21 orang	21 orang	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.500.000	7.630.000	89,77	10 jenis	12 jenis	120
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.999.500	100	10 jenis	9 jenis	90
	Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000	22.499.000	100	20 jenis	18 jenis	90.00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	14.997.600	99,98	3 jenis	3 jenis	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	2.719.000	67,98	4 jenis	4 jenis	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	17.350.000	86,75	5 unit	5 unit	99.38
11	Penyediaan Perlengkapan rumah tangga	5.600.000	5.298.000	94,61	5 jenis	5 jenis	100

11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	7.920.000	99,00	2 bacaan	2 bacaan	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	31.000.000	25.653.000	82,75	2 jenis	2 jenis	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000	298.576.319	99,53	26 kali	34 kali	130
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	93.200.000	93,20	80 kali	121 Kali	151
15	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	573.540.000	559.250.950	97,51	14 orang	14 orang	100

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 182.634.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 174.946.016,00 dengan persentase 95,79%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, RKA, DPA, LKj-IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja sehingga tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	4.975.500	99,51	6 dok	6 dok	100
2	Konsolidasi perencanaan Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	157.634.000	149.970.516	95,14	15 kali	18 kali	120
3	Sosialisasi Kinerja Program OPD	20.000.000	20.000.000	100	1 Paket	1 Paket	100

3. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif

Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang kondusif yang dianggarkan sebesar Rp. 116.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.113.396.860,00 dengan persentase 97,76 %, Target kinerja kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada 60 UKM yang ada di Kabupaten Berau untuk kemudahan pembuatan Izin Usaha.

Sampai dengan 31 Desember 2019 target tersebut tercapai sebesar 112%. Sosialisasi dilakukan ke 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dimana masing-masing Kecamatan dihadiri oleh sedikitnya 20 UMKM yang ada, sehingga total UMKM yang difasilitasi adalah 132 UMKM. yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	

1	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	116.000.000	113.396.860	97,76	24 UMKM	30 UMKM	125
---	---	-------------	-------------	-------	------------	------------	-----

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.590.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.536.156.929,00 dengan persentase 90,87% yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang terfokus pada pelatihan Wirausaha dan Pembentukan Badan Usaha, mulai dari Perencanaan, Akses Permodalan, Pembuatan Proposal Permodalan, Prosedur dan Tata Kerja Administrasi dan Akuntansi Wirausaha dll. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal bulan Maret 2019 di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Jalan Murjani I Tanjung Redeb.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 24 UKM di Kabupaten Berau, dan target tersebut tercapai sepenuhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	590.000.000	536.156.929	90,87	24 UMKK	24 UMKM	100

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.316.500.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.110.694.636,00 dengan persentase 34,97% yang bertujuan untuk

memberikan dukungan pendanaan/modal dan sarana promosi bagi UMKM di Kabupaten Berau. Dengan target capaian sebanyak 100 UMKM Kegiatan ini mencapai 94%.

Program ini mencakup 3 kegiatan yang saling mendukung dan bersinergi guna mewujudkan pencapaian target kinerja yang diinginkan. Kegiatan ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah Bagi UMKM	50.000.000	27.112.330	54,22	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Penyelenggaraan promosi Produk UMKM	66.500.000	66.377.801	99,82	15 Produk	26 Produk	173,3
3	Pengembangan UMKM	200.000.000	17.204.505	8,60	30 UMKM	24 UMKM	80

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.320.454.000,00 dengan persentase 71,21% yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Lembaga koperasi di Kabupaten Berau melalui pencapaian RAT koperasi Dengan target capaian sebanyak 76 koperasi.

Adapun sasaran pada program ini adalah meningkatkan angka koperasi yang berhasil RAT pada akhir tahun 2019, dari 80 koperasi yang ditargetkan RAT, angka yang di capai pada akhir tahun adalah sebanyak 76 koperasi. Capaian kinerja program ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100.000.000	78.122.250	78,12	24 Koperasi	24 Koperasi	100
2	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	350.000.000	242.331.750	69,24	80 Koperasi	76 Koperasi	95

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan yang dianggarkan sebesar Rp.295.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.210.989.993,00 dengan persentase 71,52% yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap 1.440 alat UTTP. Kegiatan ini mencapai lebih dari 100% dengan pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai lebih dari 1.440 alat UTTP yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	

1	Operasionaslisasi dan pengembangan UPTD Kemetrolagian Daerah	295.000.000	210.989.993	71,52	1.440 alat UTTP	1.440 alat UTTP	100
---	--	-------------	-------------	-------	-----------------	-----------------	-----

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang dianggarkan sebesar Rp.87.984.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.81.229.414,00 dengan persentase 92,32% yang bertujuan untuk meningkatkan angka ekspor komoditas dan meningkatkan angka investasi yang ditanamkan di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terselesaikannya laporan PEPIDA dan terlaksananya Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri. Kedua sasaran yang diakomodir dalam dua kegiatan ini terlaksana seluruhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri	87.984.000	81.229.414	92,32	3 Rakor	3 Rakor	100

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp.16.478.119.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.13.002.082.654,00 dengan persentase 78,91% yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada sarana perdagangan di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di pasar-pasar pada 13 Kecamatan di Kabupaten Berau, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 2.13

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK)	4.481.811.000	3.897.147.414	86,95	2 Pasar	2 Pasar	100
2	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000	99.856.885	4,76	8 Kecamatan	9 Kecamatan	113
3	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000	133.732.729	82,58	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.280.358.000	1.117.604.452	87,29	2 pasar	2 pasar	100
5	Operasional Pasar	7.254.000.000	6.782.316.748	93,50	2 pasar	2 pasar	100
6	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000	971.424.426	80,95	1 Pasar	1 Pasar	100

10. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.865.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.730.894.712,00 dengan persentase 84,50% yang bertujuan untuk kualitas dan daya saing Industri kecil dan Industri menengah yang ada di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil menengah dalam promosi produk dan peningkatan daya saing yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.12 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 2.12

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap	150.000.000	129.781.216	86,52	15 IKM	15 IKM	100

	pemanfaatan sumber daya						
2	Fasilitasi Dekranasda	600.000.000	541.938.496	90,32	5 Produk	10 Produk	200
3	Fasilitasi Sertifikasi Halal	115.000.000	59.175.000	51,46	12 IKM	12 IKM	100

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dianggarkan sebesar Rp.290.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.286.875.100,00 dengan persentase 98,92% yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan pemasaran bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Berau.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan IKM binaan dalam penggunaan teknologi industry, serta Kemasan yang memadai dan menunjang kegiatan pemasaran industri kecil menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :

Tabel 2.13
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	290.000.000	286.875.100	98,92	10 IKM	12 IKM	120

10. **Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021**

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran Strategis ini dicapai melalui dua program prioritas. Program Prioritas yang Pertama Yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2.14 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 2.14
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Industri Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	150.000.000	129.781.216	86,52	15 IKM	15 IKM	100
2	Fasilitasi Dekranasda	600.000.000	541.938.496	90,32	5 Produk	10 Produk	200
3	Fasilitasi Sertifikasi Halal	115.000.000	59.175.000	51,46	12 IKM	12 IKM	100

Program Prioritas yang Kedua yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2.15 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Perdagangan Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Kegiatan	Anggaran	Capaian	Keluaran	Capaian
-----	----------	----------	---------	----------	---------

		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK)	4.481.811.000	3.897.147.414	86,95	2 Pasar	2 Pasar	100
2	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000	99.856.885	4,76	8 Kecamatan	9 Kecamatan	113
3	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000	133.732.729	82,58	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.280.358.000	1.117.604.452	87,29	2 pasar	2 pasar	100
5	Operasional Pasar	7.254.000.000	6.782.316.748	93,50	2 pasar	2 pasar	100
6	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000	971.424.426	80,95	1 Pasar	1 Pasar	100

11. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 80,33%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau . Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi dana Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target

capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;

- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2018 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrolagian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.
- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

b. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.
- Pada tahun 2019, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalu APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

12. Tugas Pembantuan yang Diterima

a. Dasar Hukum

Pada tahun 2019, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) dengan dasar sebagai berikut :

- Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang- undang nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019
- DIPA no. 090.02.4.160404/2019

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 ini diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

c. Satuan Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dana Tugas Pembantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 ini diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, melalui bidang Sarana Perdagangan.

d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Pembangunan Pasar Rakyat ini dilaksanakan dalam DIPA Kementerian keuangan Republik Indonesia melalui Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan ini bersumber dari APBN tahun 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah Anggaran yang diterima untuk dana Tugas Pembantuan tahun 2019 ini sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah).

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat tahun anggaran 2019 ini, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, yaitu :

- Lambatnya proses perencanaan, penyusunan anggaran, asistensi anggaran belanja serta proses pencairan dana yang tidak bersamaan dengan tahun anggaran pada APBD Kabupaten Berau membuat kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat ini menjadi terlambat;
- Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pasar yang baru dibangun seperti dalam hal dukungan listrik dan air pasar, membuat pasar ini tidak dapat segera dioperasikan

Adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah dengan melakukan penganggaran untuk penambahan fasilitas listrik dan air melalui anggaran APBD Kabupaten Berau tahun 2020.

13. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tidak memiliki kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kampung/Desa/Kecamatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

14. Kerjasama Antar Daerah

Selama tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki perjanjian kerjasama/ Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemkab/ Pemkot baik dari Provinsi Kaltim maupun Luar Provinsi Kaltim.

15. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Selama tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memiliki sebanyak 2 (dua) perjanjian kerjasama/ Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pihak Ketiga yaitu :

- Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesi (Persero) Tbk tentang Penyediaan layanan Perbankan dalam Penerimaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar nomor 511.2/688/DKPP-Sp/2018
- Perjanjian Kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Berau nomor 53/NK/BEKRAF/X/2019.

16. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada Tahun 2019

Selama tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki perjanjian kerjasama/ Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Instansi Vertikal manapun.

BAB V

PRESTASI YANG DIPEROLEH

Selama tahun 2019, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Terbaik II pada Penghargaan Panji Keberhasilan Bidang Industri, Kerajinan dan Keterampilan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Berau tahun 2019

BAB V

PENUTUP

17. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau kepada Kepala Daerah Kabupaten Berau.

Laporan LKPJ Bupati oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan LKPJ Bupati oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun Anggaran 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umum dinilai berjalan dengan baik dan lancar

18. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2019, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Berau Tahun 2016 – 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan LKPJ Bupati oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.

Tanjung Redeb, 15 Januari 2020

Kepala Dinas

W i y a t i, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610121 198301 2 006

